AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.6580

ANALISIS PROGRAM SIAPP KAKA DALAM MEMPERCEPAT PROSES PEMBUATAN NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) (STUDI KASUS KELURAHAN MAYANGAN)

Analysis of the SIAPP KAKA Program in Accelerating the Business Identification Number (NIB) Issuance Process (Case Study of Mayangan Village)

Verto Septiandika[1], Andhi Nur Rahmadi[2], Siti Nur Fadilah[3]
Universitas Panca Marga
dhiilove01@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 22, 2025	Jun 20, 2025	Jul 1, 2025	Jul 6, 2025

Abstract

Business legality is a crucial factor for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in gaining access to various business development facilities. However, bureaucratic complexity and low public awareness regarding business legality remain major obstacles in obtaining a Business Identification Number (*Nomor Induk Berusaha*, NIB). This study aims to analyze the implementation of the SIAPP KAKA Program (*Aksi Andalan Pendampingan Pelayanan Perizinan di Kecamatan dan Kelurahan*) in accelerating the NIB issuance process in Mayangan Village, Probolinggo City. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the SIAPP KAKA Program has successfully expedited licensing services through a proactive (*jemput bola*) approach, resulting in greater time and cost efficiency, and improved coordination between the subdistrict office and the Investment and One-Stop Integrated Service Agency

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

(DPMPTSP). Nevertheless, the program's implementation still faces challenges, including limited human resources and infrastructure. Overall, the program has made a positive contribution to enhancing public service delivery and business legality, and it holds potential as an innovative model for locally based licensing services.

Keywords: SIAPP KAKA; Business Identification Number; Proactive Service; Licensing Services; MSMEs

Abstrak: Legalitas usaha merupakan faktor penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses berbagai fasilitas pengembangan usaha. Namun, kompleksitas birokrasi dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai legalitas usaha menjadi kendala utama dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program SIAPP KAKA (*Aksi Andalan Pendampingan Pelayanan Perizinan di Kecamatan dan Kelurahan*) dalam mempercepat proses pembuatan NIB di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SIAPP KAKA berhasil mempercepat layanan perizinan melalui pendekatan *jemput bola*, yang berdampak pada efisiensi waktu dan biaya, serta meningkatkan koordinasi antara kelurahan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan layanan publik dan legalitas usaha, serta berpotensi menjadi model inovatif dalam pelayanan perizinan berbasis lokal.

Kata Kunci: SIAPP KAKA; Nomor Induk Berusaha; *Jemput Bola*; Pelayanan Perizinan; UMKM

PENDAHULUAN

Perizinan usaha merupakan aspek fundamental dalam sistem administrasi pemerintahan yang menjamin legalitas dan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat (Dwiyanto & Agus, 2022). Di Indonesia, transformasi sistem pelayanan perizinan telah dilakukan melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang menurut Perwali Kota Probolinggo, (2024) bertujuan menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses legalitas usaha. Namun, dalam praktiknya, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih dihadapkan pada hambatan dalam mengakses dan memahami prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi dokumen dasar legalitas usaha (Utomo, & Sari, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat legalitas formal UMKM di berbagai daerah masih tergolong rendah (Puspita & Setyawan, 2022) dan mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Meskipun OSS merupakan inovasi digital pelayanan publik, sistem ini belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat akar rumput yang minim literasi digital dan akses informasi (Sedarmayanti, 2022).

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif (Fitri & Sheerleen, 2021).

Menyadari hal ini, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menginisiasi Program SIAPP KAKA (Aksi Andalan Pendampingan Pelayanan Perizinan di Kecamatan dan Kelurahan), yang menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 bertujuan untuk mengedepankan pendekatan jemput bola guna mempermudah proses pengurusan NIB langsung dari kelurahan, tanpa harus datang ke kantor pusat. Peneliti menilai bahwa program ini merupakan respons inovatif terhadap problem birokrasi klasik dan layak dikaji secara mendalam untuk menilai efektivitas dan keberlanjutannya (Prasojo & Eko, 2022). Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti keberhasilan pendekatan jemput bola dalam pelayanan administrasi, seperti program "Jebol Anduk" di Kabupaten Malang (Lokabora & Fithriana, 2018). Dan pelayanan KIA di Kota Surakarta yang mampu meningkatkan kepemilikan dokumen penting secara signifikan (Putra & Prayoga, 2023). Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis pendekatan jemput bola dalam konteks perizinan usaha melalui OSS, terutama dalam program SIAPP KAKA. Padahal, proses perizinan memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat (Indrajit, *et al.,* 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis implementasi Program SIAPP KAKA dalam percepatan pembuatan NIB di tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Kajian ini didasarkan pada teori analisis kebijakan publik dari William N. Dunn yang mencakup tahapan perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, evaluasi, dan pemantauan (Rokim, 2019), serta diperkuat dengan teori pelayanan publik responsif menurut Osborne & Gaebler dalam Madjid, (2017) dan prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP dalam (Lestari & Santoso, 2022). Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana SIAPP KAKA mempercepat proses pembuatan NIB di tingkat kelurahan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, mengevaluasi dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis pada teori dan temuan lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan desain studi kasus yang berfokus pada implementasi Program SIAPP KAKA (Aksi Andalan Pendampingan Pelayanan Perizinan di Kelurahan dan Kecamatan) dalam mempercepat proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Menurut Sugiyono, (2024) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena pelayanan publik berbasis jemput bola dalam perizinan usaha mikro. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo dan masyarakat Kelurahan Mayangan yang memanfaatkan program SIAPP KAKA, dengan teknik purposive sampling yang mempertimbangkan keterlibatan langsung informan terhadap program.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap pelaksanaan pelayanan, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci seperti Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP, Sekretaris Kelurahan Mayangan, staf layanan kelurahan, serta dokumentasi berupa laporan, buku, peraturan, dan arsip terkait. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dilengkapi dengan pedoman wawancara, alat tulis, perekam suara, dan laptop sebagai penunjang analisis. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selama proses ini, catatan deskriptif dan reflektif dikombinasikan untuk membentuk pemahaman menyeluruh atas konteks dan praktik program. Reduksi data difokuskan pada penyaringan informasi relevan yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik. Kesimpulan ditarik secara bertahap berdasarkan pola, hubungan antar kategori, serta tema-tema yang muncul dari temuan lapangan, dengan mempertimbangkan lima tahapan analisis kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu identifikasi masalah, peramalan masa depan, rekomendasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, sehingga hasil akhir penelitian dapat menginterpretasikan kebijakan secara holistik dan aplikatif terhadap konteks pelayanan publik di daerah.

HASIL

Penelitian ini menganalisis efektivitas Program SIAPP KAKA dalam mempercepat proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan publik menurut William N. Dunn, yang mencakup lima tahapan utama: perumusan masalah, peramalan masa depan, rekomendasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi. Setiap tahapan dijadikan sebagai lensa untuk menginterpretasikan data dari hasil wawancara dengan informan kunci dan fakta empiris di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa masalah utama yang menjadi dasar munculnya Program SIAPP KAKA adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan NIB. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman terhadap sistem OSS (*Online Single Submission*), keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, serta asumsi negatif masyarakat bahwa proses pengurusan izin usaha itu rumit, mahal, dan menyita waktu. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan layanan digital dengan kemampuan masyarakat tingkat bawah, yang dalam kerangka Dunn disebut sebagai bentuk ketimpangan antara kondisi ideal dengan kenyataan empiris di lapangan. Dalam konteks tersebut, SIAPP KAKA hadir sebagai respon atas kebutuhan riil masyarakat akan pelayanan perizinan yang lebih sederhana, terjangkau, dan humanis.

Program ini dirancang dengan memperkirakan berbagai konsekuensi jangka panjang. Berdasarkan data lapangan dan wawancara, diprediksi bahwa program dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha, menurunkan angka pelaku usaha informal, serta membuka akses yang lebih luas terhadap pelatihan dan bantuan pemerintah. Pendekatan jemput bola yang diterapkan memungkinkan masyarakat yang sebelumnya enggan mengurus izin menjadi lebih antusias, karena tidak perlu datang ke kantor dan bisa dibantu langsung di tingkat kelurahan. Peningkatan jumlah peserta dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya menunjukkan adanya tren partisipasi yang positif, yang mendukung pandangan Dunn bahwa kebijakan harus memiliki kekuatan prediktif untuk mengantisipasi dampak masa depan.

Rekomendasi kebijakan dalam bentuk implementasi Program SIAPP KAKA dipilih karena dianggap paling efektif dibandingkan pendekatan pelayanan berbasis OSS secara mandiri. Strategi ini dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki

keterbatasan akses dan literasi digital. Pelayanan dilakukan langsung di kelurahan dengan pendampingan teknis, sehingga proses pendaftaran NIB menjadi lebih mudah dan cepat. Pilihan kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perspektif Dunn, pilihan kebijakan yang baik adalah yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga realistis dan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.

Dari sisi pemantauan, pelaksanaan program diawasi secara berkelanjutan oleh DPMPTSP dan didukung oleh aparat kelurahan. Pemantauan dilakukan melalui laporan administrasi, jumlah peserta yang hadir dan berhasil mendapatkan NIB, serta evaluasi terhadap kendala teknis yang muncul selama kegiatan berlangsung. Selain itu, pemantauan juga dilakukan secara langsung melalui observasi selama proses pelayanan berlangsung, untuk memastikan kualitas interaksi antara petugas dan masyarakat. Pendekatan monitoring ini mencerminkan prinsip yang dianjurkan Dunn, yaitu pengawasan yang tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pelaksanaan dan dinamika interaksi lapangan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program SIAPP KAKA telah berhasil mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan. Indikator keberhasilan terlihat dari peningkatan signifikan jumlah pendaftar NIB, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha, serta tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan. Warga merasa dimudahkan dan didampingi dengan baik selama proses berlangsung. Selain dampak administratif, evaluasi juga menunjukkan perubahan perilaku sosial, di mana masyarakat mulai aktif mengurus legalitas usaha secara mandiri dan menyebarkan informasi manfaat program kepada pelaku usaha lain (Marthalina, & Khairina, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga outcome dan dampak sosial jangka panjang.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa Program SIAPP KAKA merupakan contoh kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dirancang dengan proyeksi keberlanjutan, direkomendasikan dengan pendekatan strategis, dimonitor secara sistematis, dan dievaluasi dengan hasil yang sangat positif. Dukungan dari pendapat ahli lain seperti Winarno, Dye, Subarsono, dan Widodo memperkuat bahwa kebijakan ini bersifat responsif, adaptif, dan efektif dalam menjawab kesenjangan antara regulasi pusat dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, implementasi

SIAPP KAKA dapat dijadikan model dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis pendekatan lokal yang partisipatif.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SIAPP KAKA telah mampu memberikan solusi terhadap permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan NIB, khususnya di wilayah Kelurahan Mayangan. Hasil ini relevan dengan rumusan masalah yang diajukan peneliti, yakni bagaimana efektivitas program dalam mempercepat proses perizinan usaha melalui pendekatan jemput bola. Temuan yang disusun berdasarkan tahapan analisis William N. Dunn mengindikasikan bahwa kebijakan ini telah melalui proses perumusan yang tepat, implementasi yang responsif, serta pemantauan dan evaluasi yang sistematis. Dalam konteks ini, program tidak hanya berhasil dari sisi administratif, tetapi juga mampu membangun perubahan perilaku masyarakat dalam memahami pentingnya legalitas usaha.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat kerangka konsep yang dikemukakan Dunn bahwa proses kebijakan publik idealnya harus melibatkan lima tahapan utama. Temuan pada tahap *problem definition* konsisten dengan teori Winarno yang menekankan pentingnya perumusan masalah berdasarkan realitas sosial, bukan hanya asumsi teknokratik (Pratama & Nugroho 2022). Sementara itu, keberhasilan dalam *forecasting* dan *policy recommendation* memperkuat pandangan Dye bahwa "kebijakan yang baik adalah yang mampu memprediksi dampak jangka panjang dan memilih alternatif solusi yang efisien serta kontekstual" (Sumner *et al.,* 2018). Strategi jemput bola yang diusung SIAPP KAKA terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional yang cenderung top-down dan kurang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat bawah.

Dari sisi pemantauan dan evaluasi, temuan ini sejalan dengan pemikiran Widodo menjelaskan bahwa "pengawasan kebijakan harus dilakukan secara partisipatif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan" (Paradenti, 2017). Partisipasi aktif dari aparat kelurahan dan feedback langsung dari warga merupakan bentuk implementasi monitoring yang berbasis pada interaksi sosial, bukan hanya dokumen administratif. Demikian pula, keberhasilan program dalam meningkatkan pembuatan NIB dan kesadaran hukum menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dari sisi outcome dan tidak hanya output, yang

menjadi indikator evaluasi penting menurut Dunn maupun Subarsono yang digunakan oleh penulis (Prabawati & Rahaju, 2017).

Implikasi dari hasil penelitian ini cukup signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pendekatan analisis kebijakan publik berbasis tahapan Dunn dapat digunakan secara aplikatif dalam mengevaluasi kebijakan lokal. Ini memperkuat posisi teori Dunn sebagai alat analisis yang tidak hanya konseptual tetapi juga operasional. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis lokal, seperti SIAPP KAKA, memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan kebijakan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan digitalisasi dari atas. Dengan menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat lokal, pendekatan ini berpotensi direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi serupa.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada satu kelurahan, yakni Kelurahan Mayangan, sehingga generalisasi temuan ke wilayah lain perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan, meskipun memberikan kedalaman dalam analisis, tidak memungkinkan peneliti untuk mengukur dampak kuantitatif seperti peningkatan pendapatan atau jumlah usaha formal secara statistik. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan triangulasi data lebih luas, seperti wawancara dengan pelaku usaha yang belum tersentuh program. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pusat atau dinamika politik lokal juga tidak dianalisis secara khusus, padahal hal-hal ini bisa memengaruhi keberlanjutan program.

Dengan demikian, meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktik kebijakan publik di tingkat daerah, terutama dalam konteks pelayanan perizinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak lokasi dan pendekatan mixed-method untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program sejenis di masa depan.

KESIMPULAN

Program SIAPP KAKA lahir dari kebutuhan mendesak atas kesenjangan antara sistem perizinan berbasis digital (OSS) dan keterbatasan masyarakat di tingkat kelurahan

dalam mengakses sistem tersebut. Melalui tahap perumusan masalah yang tepat, kebijakan ini berhasil mengidentifikasi akar persoalan rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam legalisasi usahanya. Dalam tahap peramalan masa depan, SIAPP KAKA diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kepatuhan hukum dan akses terhadap dukungan formal seperti pelatihan dan bantuan usaha.

Alternatif solusi kebijakan yang ditawarkan, yaitu melalui pendekatan jemput bola dan pendampingan langsung, terbukti efektif dalam mengatasi hambatan teknis, sosial, maupun administratif. Program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pendaftar NIB, serta mendapat respons positif dari masyarakat karena kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas layanan. Dalam tahap monitoring, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP dan aparat kelurahan berlangsung secara sistematis, mencakup aspek pelaksanaan teknis maupun umpan balik warga. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini tidak hanya mencapai target administratif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum dan perubahan sikap warga terhadap pentingnya legalitas usaha.

Secara keseluruhan, Program SIAPP KAKA dapat dikategorikan sebagai inovasi kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kondisi lokal. Program ini menjadi contoh praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada outcome dan dampak sosial yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini memperkuat teori Dunn serta mendapat dukungan dari literatur lain seperti Winarno, Dye, Subarsono, dan Widodo, yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, efisien, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat dalam proses kebijakan publik.

Dengan demikian, implementasi SIAPP KAKA di Kelurahan Mayangan dapat dijadikan model replikasi untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, serta menjadi dasar pengembangan kebijakan layanan perizinan usaha mikro yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan:

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan administrasi negara, khususnya dalam konteks inovasi pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan menggunakan teori analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn sebagai kerangka analisis, penelitian ini menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan dapat dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara komprehensif berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan lima tahap Dunn yang

digunakan dalam penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa proses kebijakan tidak bersifat linier, tetapi bersifat dinamis dan kontekstual.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemanfaatan pendekatan *jemput bola* sebagai strategi inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro, yang selama ini dianggap sebagai sektor yang sulit dijangkau oleh sistem perizinan formal. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi tersebut dapat meningkatkan inklusi administratif dan mempersempit kesenjangan antara kebijakan nasional yang berbasis digital dan kapasitas masyarakat lokal yang masih terbatas dalam literasi teknologi.

Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pelaksanaan kebijakan publik berbasis kelurahan dengan memperhatikan aspek kolaborasi antar instansi, partisipasi masyarakat, serta peran teknologi dalam mempercepat pelayanan. Temuan empiris dari lapangan menegaskan bahwa kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari perubahan perilaku kolektif.

Dengan demikian, studi ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model analisis kebijakan publik berbasis praktik lokal, serta menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pelayanan publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya:

Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, baik dalam pengembangan teori maupun praktik kebijakan publik.

Pertama, penelitian ini berfokus pada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Mayangan, sebagai lokasi studi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dengan membandingkan implementasi program SIAPP KAKA di berbagai kelurahan atau kecamatan lainnya di Kota Probolinggo, bahkan di kota atau kabupaten lain yang memiliki karakteristik berbeda. Perbandingan lintas wilayah akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan dan tantangan implementasi program secara lebih luas.

Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terhadap proses dan persepsi para pelaksana maupun penerima

manfaat. Namun, untuk memperkuat validitas dan generalisasi temuan, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), misalnya melalui survei terhadap jumlah yang lebih besar dari pelaku usaha mikro. Hal ini memungkinkan pengukuran dampak program secara lebih terukur dan statistik.

Ketiga, penelitian ini menekankan pada proses kebijakan berdasarkan teori William N. Dunn. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan teori analisis kebijakan lain, seperti model implementasi top-down dan bottom-up, teori multiple streams (Kingdon), atau pendekatan policy network, guna memperkaya sudut pandang analisis dan menyesuaikan dengan dinamika kebijakan lokal yang lebih kompleks.

Keempat, aspek literasi digital masyarakat dan ketahanan teknologi belum dikaji secara mendalam dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang hubungan antara literasi digital, akses terhadap teknologi, dan efektivitas kebijakan publik digital, agar mampu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era transformasi digital.

Melalui rekomendasi ini, diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya dapat melengkapi, memperluas, dan memperdalam pemahaman tentang efektivitas kebijakan pelayanan publik berbasis lokal dalam mendorong legalitas usaha dan pembangunan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto & Agus. (2022). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress.

Indrajit & Richardus Eko. (2023). Digital GovernmentTransformation: Konsep dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prasojo & Eko. (2022). Birokrasi Digital: Transformasi Manajemen Pemerintahan Indonesia di Era Disrupsi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sedarmayanti. (2022). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.

Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, *7*(2), 790–807. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh

Indah Prabawati, & Tjitjik Rahaju, B. K. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue April).

Lestari, R. A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, *2*(1), 43. https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134

Madjid, L. (2017). Optimalisasi Pelayanan Publik Perspektif David Osborne. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, *8*(2), 130–140.

Marthalina, & Khairina, U. (2022). Pentingnya Nomor Induk Berusaha bagi Pelaku UMKM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(1), 45-59.

Pratama, R., & Nugroho, B. (2022). Harmonisasi Regulasi dalam Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi. Jurnal Kebijakan dan Hukum, 6(1), 56-71

Paradenti, D. (2017). Partsisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dana desa: Studi kasus di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. *Holistik*, *10*(20), 1–17. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/17552/17084.

Puspita, R., & Setyawan, A. (2022). Peran NIB dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Indonesia. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 7(3), 78-91.

Putra, T. D., & Pramudhita Restilianingrum Prayoga. (2023). Implementasi Program Jemput Bola Sebagai Sarana Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kota Surakarta. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi Dan Sosial Terapan*, *1*(2). https://doi.org/10.20961/evokasi.v1i2.492

Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, *14*(2), 60–69. http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-

Sumner, M., Harison, J., & Elda, S. (2018). Pearson New International Edition. In *British Library Cataloguing-in-Publication Data*.

Utomo, R., & Sari, D. P. (2023). Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Sistem Perizinan Digital: Studi Kasus di Jawa Timur. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 7(2), 167-182.

Yollan Lokabora, M., & Fithriana, N. (2018). Inovasi Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *7*(3), 64–69. www.publikasi.unitri.ac.id

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [UU No. 6 Tahun 2023]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia

Wali Kota Probolinggo. (2024). Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [Perwali No. 8 Tahun 2024]. Pemerintah Kota Probolinggo